

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga

Mardiana Mardiana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Agus Hendrayady

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Ramadhani Setiawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: mardiana13201@gmail.com

Abstract: *Implementation of Supervision of Trawl Fishing Equipment (Trawls) in Selayar District, the use of these trawls which are still operating due to supervision that is not running effectively. This study aims to determine the Implementation of Supervision of Trawling Equipment in Selayar District, Lingga Regency. The research method used is a qualitative research approach with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In this study using the theory of supervision according to Joko Widodo (2016: 94). The results of this study indicate that: a. the supervisors implementing the policy, the supervisors, namely the agencies and other auxiliary apparatus in this supervision are still not running well or have not been implemented because there are still fishermen who use the Trawl fishing gear, b. Standard Operating Procedures (SOP), under supervision have been implemented in carrying out supervision, so for this indicator it has been implemented sufficiently and is running according to the specified SOP, c. Financial Resources and Equipment, in this indicator there is still a lack of budget and some equipment is under supervision, so for this indicator it is still not sufficiently implemented because it is still constrained by a lack of budget, d. Schedule for Supervision Implementation, for the schedule itself, of course there is a special schedule but for carrying out self-monitoring sometimes it doesn't necessarily depend on the incoming reports, for this indicator it has also been implemented because the existing schedule is also in accordance with the time and reports received. Based on the research indicators, it can be concluded that the implementation of this supervision has not run optimally because there are still many fishermen in the Selayar District who use trawls. The recommendation that is needed is the implementation of supervision that should be carried out effectively so that there is no longer use of trawl fishing gear in Selayar District.*

Keywords: *Monitoring, Fishing Equipment, Trawls*

Abstrak: Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Selayar, penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) ini yang masih terus beroperasi dikarenakan pengawasan yang tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Joko Widodo (2016:94). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, pelaku pengawasannya yaitu para pihak dinas dan aparatur pembantu lainnya dalam pelaku pengawasan ini masih belum berjalan dengan baik atau belum terlaksanakan karena masih terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) tersebut, b. Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam pengawasan sudah diterapkan dalam melakukan pengawasan, jadi untuk indikator ini sudah cukup terlaksana dan berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan, c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, dalam indikator ini masih kekurangan anggaran dan beberapa peralatan dalam pengawasan, jadi untuk indikator ini masih belum cukup terlaksana karena masih terkendala dengan anggaran yang kurang, d. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, untuk jadwal sendiri tentunya ada jadwal khusus tetapi untuk melakukan pengawasan sendiri terkadang tidak tentu tergantung laporan yang masuk, untuk indikator ini juga sudah terlaksana karena jadwal yang ada juga sesuai dengan waktu dan laporan yang masuk. Berdasarkan dari indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan ini belum berjalan optimal karena masih banyaknya nelayan di kecamatan selayar

yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls). Rekomendasi yang diperlukan yaitu pelaksanaan pengawasan yang sebaiknya dijalankan dengan efektif supaya tidak ada lagi penggunaan alat penangkapan pukat hela di Kecamatan Selayar.

Kata Kunci: Pengawasan, Alat Penangkapan Ikan, Pukat Hela (*Trawls*)

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, selain memiliki keanekaragaman budaya juga kaya akan sumber daya laut. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam kemaritiman. Di Indonesia masalah kelautan dan perikanan hampir setiap hari menjadi omongan atau topik pembicaraan yang tidak akan habisnya, wajar mulai dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum dalam bidang perikanan ikut membicarakan terkait hal ini sebab masih terdapatnya pelanggaran terhadap bagian dari perikanan di Indonesia.

Dalam permasalahan kelautan dan perikanan banyak terjadi hal yang menyimpang dari sector perikanan itu sendiri. Pengawasan dalam sector kelautan dan perikanan ini yang harus lebih ditingkatkan lagi dan harus dijalankan secara efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini yaitu Permasalahan illegal fishing, alat penangkapan ikan, penggunaan kapal tanpa izin. Ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh aparat pemerintah. Permasalahan terkait pengawasan ini juga sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka dari itu mempunyai tugas dan wewenang terhadap daerah yang berkaitan dengan pengawasan sehingga jarak antara masyarakat dan pemerintah yang berwenang menjadi lebih jauh. Maka dari itu timbullah ketidakefisiensi terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi di daerah serta menjadi hambatan/kendala bagi masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan juga melaporkan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu kabupaten yang berada di provinsi kepulauan riau yang menjadi permasalahan dalam pengawasan ini yaitu kabupaten lingga. Di wilayah kabupaten lingga masih terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang terlarang yaitu alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) yang dimana alat penangkapan ikan ini sudah jelas dilarang oleh menteri yang diberlakukan didalam peraturan menteri No. 2 Tahun 2015 “Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia.

Wilayah di Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1%) dan lautan 209.654 km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau yang belum berpenghuni. Kabupaten Lingga terdapat 13 Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, dan Kecamatan Temiang Pesisir. Salah satu kecamatan yang berpotensi dalam kelautan yaitu Kecamatan Selayar dimana hampir seluruh penduduknya tinggal di daerah pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan. Terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Alat tangkap tradisional yang dimaksud disini ialah alat tangkap ikan pada umumnya seperti pancing, bubu, jaring, dan lain-lain.

Di Kecamatan Selayar ini masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta yang bisa merusakkan ekosistem lautnya. Alat tangkapan ikan yang tidak ramah ini dimaksudkan yaitu alat tangkap ikan yang terlarang seperti pukat hela (*trawls*) atau pukat harimau. Pukat hela (*Trawls*) ini alat penangkapan ikan yang memberikan dampak buruk jauh lebih dari keuntungannya. Dikarenakan penggunaan dan bentuk lubang jaringnya yang terbilang memiliki ukuran lubang yang kecil sehingga bisa menangkap biota laut seperti udang, kepiting, dan ikan-ikan. Pukat hela ini merusak ekosistem laut dikarenakan ikan yang ditangkap tersebut bukan ikan yang sesuai targetnya dan juga terumbu karang rusak. Untuk kerusakan dari penggunaan alat penangkapan ikan ini yaitu ekosistem laut seperti terumbu karang yang tertarik oleh alat penangkapan ikan tersebut sehingga membuat pergeseran dari tempatnya dan bisa juga terangkat oleh alat penangkapan tersebut. Dikarenakan hal tersebut Pukat Hela dilarang secara hukum.

Dari penggunaan alat penangkapan ini lah yang merusak ekosistem laut serta juga berdampak sangat buruk terhadap nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional tersebut. Maka dari itu perlunya pengawasan yang efektif dalam penanganan masalah kelautan ini dan juga perlunya tindakan hukum bagi pelaku tindakan tersebut. Untuk pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien Dinas Kelautan dan Perikanan ini harus bekerja sama dengan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga agar lebih cepat untuk melakukan penangkapan terkait nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan ini Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk kumpulan masyarakat yang diberi nama POKMASWAS.

Dari uraian data-data yang dituliskan oleh peneliti terdapat fenomena masalah yang didapatkan dari data lapangan tidak berjalan efektif pengawasan atau kurangnya pengawasan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau dan cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lingga sehingga masih banyak terdapat masyarakat nelayan di Kecamatan Selayar yang masih menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) ini karena kurangnya pengawasan langsung oleh aparat pengawasan. Adapun permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini mengenai tidak adanya pembentukan POKMASWAS di Kecamatan Selayar sehingga kesusahan bagi masyarakat nelayan ataupun masyarakat yang paham terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan ini untuk membuat laporan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk melaporkan hal tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, penelitian ini memperluaskan studi dari, Taufiq Ikhtiar Harefa(2019), Yasser Arafat(2019), Dea Ananda Pertiwi(2019), Devri Agusti(2021), Sri Wahyuni Sapitri (2022). Perbedaan penelitan sebelumnya dengan penelitian ini yaitu untuk pelaksanaan pengawasannya ini masih belum berjalan dengan efektif, anggaran yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Perbedaan lainnya juga kebijakan terkait pelanggar juga belum terlihat jelas sehingga masih terus beroperasinya alat penangkapan ikan ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran secara menyeluruh terkait pelaksanaan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dikecamatan selayar kabupaten lingga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat dilihat dengan menggunakan teori Strategi Pemantauan Pengawasan Menurut Joko Widodo (2016:94) yang

terdiri dari beberapa indikator yaitu: Pelaku Pengawasan Pelaksana Kebijakan, Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, Jadwal Pelaksanaan Pengawasan.

1. Pelaku Pengawasan Pelaksana Kebijakan

Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan terkait Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga yaitu, untuk pelaku pelaksananya disini yaitu pengawasan di kecamatan selayar ini masih dominan dilakukan oleh para pihak Dinas dan aparaturnya seperti Polisi air dan Angkatan Laut. Sedangkan untuk para nelayan tradisional di kecamatan selayar sendiri tidak dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Maka untuk indikator pelaku pengawasan disini masih Belum Terlaksana, karena tidak adanya pembentukan suatu kelompok pengawasan dikecamatan selayar ini sehingga masyarakat yang mengerti dan paham akan larangan penggunaan alat penangkapan ikan ini tidak mempunyai wewenang atau hak untuk melaporkan kepada pihak dinas karena mereka tidak mempunyai izin resmi untuk berwenang terhadap hal itu maka dari itu masih terdapatnya nelayan yang menggunakan alat penangkapan seperti itu di Kecamatan Selayar sendiri.

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Cabang Kabupaten Lingga terkait SOP dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga bahwa sudah ada pembentukan SOPnya dan juga sudah terapkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk alat monitoringnya juga sudah ada yaitu berupa arahan dari Atasan yang memberikan informasi untuk para staff melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan juga kalau dari masyarakat nelayan sendiri tahunya terkait bentuk pengawasan atau SOP yang diterapkan pihak dinas mereka hanya melihat dari apa yang tunjukkan oleh pihak dinas saja. Jadi untuk indikator SOP ini Sudah Terlaksana dan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, bahwa Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) DiKecamatan Selayar Kabupaten Lingga, dalam inikator ini dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk anggaran atau keuangan untuk pelaksanaan pengawasan tersebut kurang memadai akan tetapi dari bentuk peralatan sudah cukup memadai. Hal inilah yang membuat para pelaksana pengawasan kesulitan untuk mengawasi secara langsung. Jadi, untuk indikator Sumber Daya Keuangan dan Peralatan Belum Terlaksana karena dari sector keuangan yang belum memadai serta peralatan keamanan yang kurang seperti senjata dan alat pelindung diri sehingga para pihak dinas tersebut mengalami kekurangan untuk

patroli dengan efektif. Untuk saat sekarang ini belum ada pengawasan yang rutin karena banyak memerlukan keuangan untuk saat sekarang ini.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Jadwal Pelaksanaan Pengawasan, bahwa Pelaksanaan Pengawasan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga, untuk jadwalnya sendiri masih bersifat tentatif atau berubah-ubah, jadi dari pihak dinas sendiri melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan laporan yang masuk dan juga sesuai dengan waktu agar tidak bentrok ke pekerjaan yang lain dan pelaksanaan pengawasan ini juga dilaksanakan setahu dua kali dalam peninjauan langsung. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa informan masyarakat ada yang pernah melihat pihak dinas meninjau dan ada juga yang hanya mendengar kabar atau berita saja. Untuk indikator ini Sudah Terlaksana dalam jadwal pelaksanaan pengawasannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat ditarik kesimpulan atau rekapitulasi secara keseluruhan terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DKP masih belum berjalan dengan optimal , karena masih banyaknya nelayan diberbagai daerah terutamanya didaerah kecamatan selayar yang tetap menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela tersebut. Bahkan untuk saat ini saja pihak DKP pun belum ada tindak lanjut terkait permasalahan kelautan dan permasalahan yang berkaitan dengan nelayan.

Saran Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dapat berjalan dengan baik. agar Untuk para pihak terkait hal ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat nelayan, serta dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasannya agar pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela ini bekurang dan bisa memperbaiki ekosistem laut. Saran lainnya juga dapat menambah sarana dan prasarana berupa teknologi yang canggih untuk pemantauan dari jauh dan bisa memudahkan untuk melakukan pengawasannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA.,Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, S. Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan arahan dan masukan.
4. Bapak Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S. Sos., M. Soc. Sc, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu yang sangat bermanfaat serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ikut berkontribusi.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga yang telah memberikan izin, bantuan, masukan, saran serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Kedua Orangtua penulis yang tersayang Ibunda Sabariah dan Ayahanda Saparudin yang selalu memberikan selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabaran yang sangat luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis. Penulis berharap bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua orangtuanya.
9. Teruntuk Nenek Tercinta Kamisah, Kakak Tersayang Siti Susanti dan Adik Tercinta Devi Julianti yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk Teman-Teman Grup Gadis Sampul Pela Niadaniati dan Dewi Safitri Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka pada dunia perkuliahan dan Terimakasih juga atas semua masukan, saran, dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan. Semoga Impian dan Harapan kita bisa terwujud.
11. Teruntuk Kos Anak Rantau yakni, Sitti Nurhafizhah, Sherina, E. Mariani, Nina Agniya, dan Vera Agustina, Terimakasih kalian telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, dan juga terimakasih kalian telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sukses.
12. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Administrasi Negara Terimakasih telah berjuang bersama selama ini.

13. Teristimewa yakni Diri Sendiri Mardiana Terima kasih yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga sampai ditahap ini, semoga semua yang telah diperjuangkan bisa terwujud.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Akhmad Solihin. (2010). Politik Hukum Kelautan & Perikanan (Pertama). Bandung: Nuansa Aulia.
- Dr.Ir.Mimit Primyastanto,M.P. (2017). Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jawa Timur: Intrans Publishing
- Dr.Jum Angriani S.H., M. . (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Pemerintah Daerah. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Hadi, E. P. (2019). Bahan Dan Alat Tangkap Penangkap Ikan. (E. Priyana, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: SMK.
- Handyaningrat, S. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen (15th ed.). Jakarta: Haji Mas Agung.
- Haw, W. (2009). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom (1st–5th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Wayan Tarthiana, SH.,MH. (2015).Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional. (Kedua). Bandung. Cv Mandar Maju.
- Lubis, H. I. (1985). Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurchotimah, A. S. I. (2021). Pengawasan Pelayanan Publik. (R. A. Nugroho, Ed.) (Hendrik Ef). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D (Ke-23). Bandung: Alfabeta CV.
- Tian Nur Ma'rifat, D. (2020). Dasar-Dasar Perikanan Dan Kelautan (Pertama). Malang: UB Press.
- Tribawono, D. (2013). Hukum Perikanan Indonesia (ke 2). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Widodo, J. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Mayumedia Publishing.
- Widjaja, HAW,2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Revisi). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

JURNAL

- Agusti, D. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Universitas Islam Riau.
- Arafat, Y., & Dosen. (2019). Rasio legis kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Bekelanjutan, (September), 51–62.

- Baami, I. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Limbah Medis Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Pada Rumah Sakit Raja Ahmid Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hasbullah. (2019). Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia). Jurnal YUSTITIA, 67-82.
- Juanda Syahputra, E. S. S. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Pukat Harimau Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Batu Bara. Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, 22(2686–5750), 52–61
- Kurniawati Latri. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan Karang Di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang. Universitas Sultang Ageng Tirtayasa.
- Lusiani, Devi. Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWL) dan Pukat Tarik (SEINE NETS)
- Mariamus O. Brewon, E. S. (2022). Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Kriteria Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan di Peraiaran Pantai Timur Sumatera utara. Journal of Fisheries and marine science, 46-65.
- Nurfaika Ishak, S. f. (2019). Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia . Fakultas Hukum , 59-77.
- Pertiwi, D. A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Prastanto Alfandi Surya. (2016). Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan. Jurnal Hukum,1-9.
- Sapitri, S. W. (2022). Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) Di Kecamatan Selayar Oleh Dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Islam Riau.
- Ula Aulia S.F. (2016). Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) Dan Pukat Traik (SEINE NETS) Di Kabupaten Lamongan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Taufiq, H. I. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Riau.
- Wedayanti, Made Devi. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1.No 1.

DOKUMEN

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2015 tentang: Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 tentang:
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik
(Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsis Kepulauan Riau, tentang: Data-Data Masyarakat
Kelompok Pengawasa (POKMASWAS) Kepulauan Riau